

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP) OLEH DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
(Studi Pada Program Pembudidayaan Ikan Di Kampung Madong)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh**

**Tikasari Tusiana**

**NIM.100563201091**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2015**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK .....	1
PENDAHULUAN.....	3
LANDASAN TEORI .....	15
METODE PENELITIAN.....	23
PEMBAHASAN .....	27
KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	41

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP) OLEH DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
(Studi Pada Program Pembudidayaan Ikan Di Kampung Madong)**

**Tikasari Tusiana**  
**Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH**  
[tikasaritian@gmail.com](mailto:tikasaritian@gmail.com)

***ABSTRAK***

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Karena suatu program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta merasakan dampaknya. Setelah kebijakan ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan tersebut harus segera diimplementasikan, sebab kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan diimplementasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan publik.

Tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Pembudidayaan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di kampung Madong. Dalam hal ini yang akan menjadi informan penelitian berjumlah 10 orang yaitu: informan kunci 1 orang kepala bidang program Pemberdayaan, informan utamanya ada 6 orang ketua kelompok. Sedangkan informan tambahan 1 orang Sekertaris Lurah dan 2 orang satuan kerja / pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan yang memang menangani bidang pembudidayaan ikan yang ada di Kampung Madong.

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori model Edward III dalam Nugroho (2012:693), untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: 1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. 2. Sumber-sumber yaitu ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu para pegawai sebagai implementor dan sarana maupun dana yang diperlukan atau dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut. 3. Kecendrungan-kecendrungan atau sikap yang dimaksud adalah sikap pegawai dalam menjalani program pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan ikan. 4. Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Pembudidayaan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di kampung Madong Kelurahan Kampung Bugis sudah terlaksana. Hanya saja Pemerintah harus memperhatikan lagi dalam kebijakan ini diharapkan pemerintah mau

mendengarkan keluhan masyarakat mengenai pakan, diharapkan pemerintah dapat menyediakan tempat pembuatan pakan sendiri dan dikelola oleh kelompok pembudidaya secara bergantian. Serta untuk kedepannya agar ditambah lagi jumlah pemberian bibit ikan agar bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat pesisir yang ada di kampung Madong. Dan agar benar benar diperhatikan bibit ikan yang diberikan harus yang berkualitas baik.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat, Pesisir

### **ABSTRAK**

*Policy implementation is a very important stage in the overall structure of the policy. For a program that has been set must be implemented in order to achieve the desired goals and feel the impact. After a legally defined policies and have the force of law (legitimacy), then the policy should be applied, because the new policy has meaning when the policy is applied through an appropriate way and as it should be in the public interest.*

*The goal of researchers to find out how the application of the Coastal Community Economic Empowerment Policy in fish farming by the Department of Marine and Perikanan Riau Islands Province in the village Madong. In this case that would be the informant study amounted to 10 persons, namely: 1 person key informant head of Empowerment program, there are 6 main informant group leader. While additional informants 1 person secretary headman, and 2 units of labor / employee Department of Marine and Fisheries Islands Province which is dealing with the field of aquaculture in Kampung Madong.*

*Operational concepts used in this study refers to the theoretical model of Edward III in Nugroho (2012: 693), to pay attention to four key issues in order to be an effective policy implementation, namely: 1. Communication with regard to how the policy is communicated to the organization and / or the public and attitudes and the response of the parties involved. 2. The sources that the availability of the resource in question is the availability of resources, be they employees sebayai implementor and the means nor the funds needed or required in the implementation of the policy. 3. Tendency-trend or attitude in question is the attitude of employees in carrying out community development programs in the empowerment of the fish. 4. The structure of bureaucracy regarding the suitability of bureaucratic organization to host public policy implementation.*

*Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. After doing research Implementation of Coastal Community Economic Empowerment Policy in fish farming by the Department of Marine and Perikanan Riau islands in the village of Kampung Bugis Madong already accomplished. It's just that the Government should pay attention to this policy is expected again in the government listens to community concerns about the feed, the government is expected to be able to provide its own feed production and managed by farmer group in turn. As well as for the future so that plus the*

*amount of the provision of fingerlings that can really lift the economy of coastal communities in the village Madong. And in order to really be considered fingerlings provided should be of good quality.*

*Keywords : Implementation, Policy, Empowerment , Economy, Society, Coastal*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Karena suatu program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta merasakan dampaknya. Implementasi sebagai bagian suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan

Kepala Dinas, dll (Dwijowijoto, 2004: 158 - 160).

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo 2010:87). Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi sebuah program merupakan tahapan penting yang karena suatu program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta merasakan dampaknya. Implementasi sebagai bagian suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S.Cleaves dalam Wahab (2008;187), secara tegas menyebutkan, “Implementasi itu mencakup *a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps* (Cleaves, 1980).

Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu kebijakan publik disebut “*policy delivery system*” (system penyampaian / penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara - cara atau saran - sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran - sasaran yang dikehendaki.

Mazmanian dan Sabatier (1979) yang dikutip oleh Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian - kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah

disahkannya pedoman - pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian (Wahab, 1997:64-65).

Menurut Nugroho (2012:674), mengatakan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa didalam implementasi terdapat suatu

keputusan/kebijakan yang harus dilaksanakan baik itu dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan yang sudah ditetapkan, dalam kebijakan tersebut terdapat tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat. Didalam sebuah kebijakan juga ada upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan memperbaiki masalah-masalah yang dapat menghambat tujuan awal tanpa harus merubah kebijakan yang sudah ditetapkan dahulu.

Sebelum adanya program pembudidayaan ini daerah pesisir belum tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut

berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), mencoba meletakkan kembali dasar-dasar pengembangan kawasan pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam ekonomi menurut Kieffer (1981) adalah meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, diarahkan untuk adanya akses terhadap pelayanan keuangan mikro, akses terhadap pendapatan, akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga dan akses terhadap pasar.

Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan



an masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan prioritas pengelolaan dan pembudidayaan skala kecil dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses permodalan melalui pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro mina yang mandiri sesuai dengan karakteristik local.
2. Terasilitasnya implementasi teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SDA
3. Berkembangnya jaringan informasi usaha, permodalan dan pemasaran

4. Meningkatkan kualitas SDM pesisir dalam manajemen usaha dan pemanfaatan SDM Pada tingkatan mikro aspek kelembagaan lebih dikenal sebagai suatu *institutional arrangement* yang lebih mengedepankan institusi pemerintah.

Sasaran program seperti yang tertuang dalam Kepmen No. 18 tahun 2004 adalah masyarakat pesisir miskin. Masyarakat pesisir miskin yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Namun kondisi di lapangan berdasarkan observasi menunjukkan bahwa yang memanfaatkan kredit adalah mereka yang tidak miskin. Peserta program memang tergolong miskin tetapi

masyarakat yang tergolong sangat miskin justru tidak satupun yang pernah menerima bantuan kredit.

Dalam konteks perikanan dan kelautan lembaga terkait berperan penting dalam mengatur mekanisme alokasi sumber daya yang bersifat khusus. Dalam organisasi dan kelembagaan PEMP beberapa pihak yang terlibat didalamnya :

1. Pemerintah, yang terdiri atas departemen kelautan dan perikanan dan dinas provinsi atau kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan
2. Konsultan Manajemen, terdiri atas LSM, akademisi atau perusahaan jasa konsultasi yang ditunjuk oleh kepala daerah melalui kepala dinas kabupaten/kota

3. Tenaga pendamping desa (TPD), dalam tugasnya TPD meliputi mendampingi masyarakat pesisir untuk mengakses dana ekonomi produktif, pendampingan teknis dan manajemen usaha, membantu masyarakat pesisir dalam mengakses modal usaha dari APBD.

Dari beberapa hasil penelitian, kondisi wilayah pesisir Indonesia tergolong padat penduduknya dengan tingkat kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya tergolong masih rendah. Namun jika dilihat dari segi potensi sumberdaya pesisirnya, khususnya di kampung Madong, Kota Tanjungpinang, sebenarnya menyimpan potensi yang cukup tinggi, khususnya pembudidayaan ikan. Disamping itu beberapa hasil penelitian juga memperlihatkan kurangnya

pengetahuan masyarakat mengenai teknologi modern dan ramah lingkungan serta upaya kreatif untuk peningkatan pendapatan khususnya dalam musim paceklik, dimana hasil melaut sangat terbatas (Sahrin, 2013:337).

Meskipun kurang populer, usaha perikanan budidaya relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha perikanan tangkap yang memiliki ketergantungan tinggi kepada alam. Selain itu, usaha perikanan budidaya juga lebih teratur sehingga terbuka peluang kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan terkait dengan masalah pembiayaan. Meskipun demikian, perikanan budidaya ini tidak serta merta menggeser usaha perikanan tangkap karena keduanya bisa berjalan beriringan.

Meskipun secara kuantitas persentase produksi masih terbilang cukup kecil bila dibandingkan dengan aktivitas eksplorasi penangkapan ikan, data tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di wilayah Kepulauan Riau terlihat senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, produksi budidaya tersebut senantiasa selalu berada di atas target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan pencapaian yang cukup signifikan di tahun 2012 bila dibandingkan dengan pencapaian yang sama di tahun 2011, yakni dari sebesar 6,64 ribu ton menjadi 23,19 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 250%.

Tabel 1.1.  
Produksi Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SUBSEKTOR	2011 (Ribu Ton)		2012 (Ribu Ton)	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Produksi Perikanan Tangkap	302,99	308,75	333,30	350,56
2.	Produksi Perikanan Budidaya	6,54	6,64	8,46	23,19
3.	% Budidaya terhadap Tangkap	2,1%	2,15%	2,53%	6,6%

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (diolah)

Budidaya terhadap ikan laut ini juga semakin digalakkan untuk mengatasi kendala kelangkaan sumber daya ikan di masa depan akibat penurunan kualitas biota lingkungan laut tempat ikan tersebut hidup dan berkembang biak, antara lain berupa terumbu karang. Diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat eksplorasi yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup serta efek negatif dari perkembangan industri. Angka kerusakan terumbu karang juga diindikasikan meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi aktivitas penangkapan ikan dengan masif dan mengalihkannya kepada kegiatan budidaya.

Tabel 1.2.  
Kondisi Terumbu Karang di Perairan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SUBSEKTOR	2011		2012	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Terumbu karang kondisi baik (%)	82	82	84	69,74
2.	Terumbu karang kondisi rusak (%)	18	18	16	29,21
3.	Padang lamun kondisi baik (%)	50	50	55	70,07

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (diolah)

Tantangan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar terutama terkait masalah pakan. Sampai saat ini belum ada pabrik yang memproduksi pakan ikan. Oleh karena itu pakan harus

dikirim dari daerah lain seperti Situbondo. Namun bila cuaca buruk pakan ikan akan lama sampai dan otomatis pembudidaya akan kekurangan pakan untuk ikan mereka. Hal ini menyebabkan suplay pakan terbatas yang berakibat pada tingginya harga. Padahal pakan adalah salah satu komponen penting dalam proses produksi perikanan budidaya. Perlu diadakan inovasi untuk mencari pakan alternatif dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pakan hasil produksi pabrik. Adanya pakan alternatif tersebut diharapkan dapat membantu peternak ikan mengurangi biaya produksinya, sehingga dapat menghasilkan ikan dengan biaya yang lebih kompetitif.

Apabila kita lihat dari tabel 1.1 produksi perikanan budidaya telah melampaui target yang di

tentukan pastinya kita berfikir tidak adanya kendala dalam hal pakan. Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan bahwa untuk menutupi kekurangan pakan yang sering tersendat dari pemerintah kelompok pembudidaya mencari alternatif pakan sendiri. Mereka membeli pakan menggunakan uang mereka terlebih dahulu ataupun mencari dan membuat pakan sendiri. Sehingga program pembudidayaan ini tetap menghasilkan untuk mereka. Padahal seharusnya pakan disediakan oleh pemerintah dan tidak boleh putus.

Berdasarkan data Kajian ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan (Tw) I 2014 program budidaya ikan laut ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengadaan pakan sebagai salah satu faktor yang cukup penting. Adalah hal yang sangat memungkinkan

untuk membangun suatu pabrik pakan ikan di wilayah Kepulauan Riau, dengan syarat bahwa bahan baku untuk itu tersedia dan terdapat dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang strategis. Sejauh ini, diketahui bahwa bahan baku pakan ikan, tepung ikan, masih mengandalkan impor, dan sekitar 70% bahan baku pakan ikan tersebut diimpor dari sejumlah negara seperti Chili dan Peru, mengingat bahwa pasokan bahan baku lokal masih sulit diandalkan karena kandungan proteinnya tidak sesuai standar dan pasokannya yang tidak stabil. Sehingga pada saat panen raya para anggota kelompok pembudidaya mengusulkan untuk bisa disediakan kelong dan alat pembuat pakan ikan. Agar mereka bisa membuat pakan

sendiri dan masalah pakan yang sering terkendala dapat teratasi.

Selain masalah pakan ternyata ada juga masalah mengenai pemberian bibit ikan ikan yang kurang maksimal. Dilihat dari segi jumlah dan juga dari segi kelayakan untuk dibudidayakan. Bibit yang diberikan untuk satu kelompok itu hasilnya kelak akan dibagi untuk setiap anggota. Satu kelompok terdiri dari 10 orang sedangkan bibit ikan yang diberikan yaitu bibit bawal bintang hanya 1300 ekor dan bibit ikan cantang 620 ekor per kelompok. Jumlah tersebut akan mengalami pengurangan karena akan ada angka kematian. Hingga akhirnya hanya tersisa sedikit saja. Hal tersebut tidak sebanding dengan capek yang dirasa para pembudidaya ikan tersebut. Karena memelihara ikan ini harus benar-benar seperti merawat bayi.

Jika pada usaha perikanan tangkap segala kebutuhan ikan telah disediakan oleh alam, masyarakat tinggal menangkap, maka pada usaha perikanan budidaya, semua kebutuhan ikan harus dipenuhi oleh peternak. Mulai dari bibit, pakan, hingga kebutuhan kesehatan ikan menjadi tanggung jawab peternak.

Adapun jumlah kelompok pembudidaya yang ada di Kampung

Madong yaitu 6 kelompok usaha bersama (KUB) pembudidaya yang telah terbentuk satu kelompok terdiri dari 10 orang. Adapun nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta ikan yang sudah dibudidaya masing-masing kelompok yang ada di kampung madong yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Koprasi Usaha Bersama (KUB) di Kampung Madong**

<b>No.</b>	<b>Nama KUB</b>	<b>Ikan yang Dibudidayakan</b>
1.	Maju Mandiri	✓ Ikan Bawal Bintang ✓ Ikan Kerapu Cantang ✓ Ikan Macan Tiger
2.	Ikan Merah	✓ Ikan Kerapu Cantang ✓ Ikan Kerapu Lumpur
3.	Kelana	✓ Ikan Kerapu Cantang ✓ Ikan Kerapu Hitam
4.	Kerapu	✓ Ikan Kerapu Cantang ✓ Ikan Kerapu Lumpur ✓ Ikan Bawal Bintang
5.	Bawal Bintang	✓ Ikan Bawal Bintang ✓ Ikan Kakap Putih ✓ Ikan Kerapu Cantang

6.	Rezeki Pesisir	<input checked="" type="checkbox"/> Ikan Bawal Bintang <input checked="" type="checkbox"/> Ikan Kerapu Cantang
----	----------------	---

Sumber : Data Hasil Wawancara, Tahun 2015

Dalam penelitian ini saya mengambil lokasi penelitian di kampung Madong Kelurahan Kampung Bugis dikarenakan saya melihat bahwa di Kampung Madong usaha pembudidayaan ikannya lebih maju dan lebih berhasil dibanding daerah lain yang ada di Provinsi Kepri. Hal ini yang mendasari penulis mengangkat judul tentang **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pada Program Pembudidayaan Ikan Di Kampung Madong)”**

Dengan melihat hal-hal yang ada dilatar belakang, peneliti merumuskan permasalahan dalam peneltitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dalam Pembudidayaan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di kampung Madong?
2. Apakah ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dalam Pembudidayaan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di kampung Madong?

Kegunaan dari diadakannya penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dalam Pembudidayaan Ikan oleh Dinas



Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di kampung Madong adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik : Manfaat dari segi akademis adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dalam Pembudidayaan Ikan di Kelurahan Madong Kota Tanjungpinang. Serta sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis : Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir (PEMP)

Dalam Pembudidayaan Ikan.

Dengan kata lain membantu

pihak Pemerinta dalam hal

menyadari pentingnya kerjasama

yang baik dan kondusif dalam

mewujudkan keberhasilan

program pemberdayaan ikan ini

guna untuk memberi

kesejahteraan bagi masyarakat

pesisir khususnya.

## LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Menurut Edward III dalam Nugroho (2012:693), menegaskan bahwa:

“Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan. Tanpa Implementasi yang efektif keputusan yang pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses. Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*”.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut sebagai implementasi. Udoji dalam Wahab, (2008:59), mengatakan bahwa :“*The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue*

*prints file jackets unless they are implemented*". (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2008), mengatakan bahwa implementasi adalah :

“Pelaksanaan Keputusan Kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implemementasi kebijakan, aliran *topdown* yang

dikemukakan oleh George C Edward III yang focus analisisnya berkisar pada masalah – masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan banyak dijadikan acuan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Sebagaiberikut :

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

#### 1) Komunikasi (*Communication*)

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan - keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

#### 1. Sumber – sumber (*Resource*)

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber - sumber yang penting meliputi :staf yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas – tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan –pelayanan publik.

#### 2. Kecenderungan – kecenderungan

(*Dispositions or attitude*)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan factor ketiga yang mempunyai konsekuensi – konsekuensi penting

bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku – tingkah laku atau perspektif – perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

#### 3. Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk –bentuk organisasi untuk

kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah – masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi – organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi - institusi pendidikan dan kadang kala suatu system birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

## 2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas sosial-ekonomi saja namun juga secara “politis”, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara regional maupun nasional. Konsep "*empowerment*", menurut Friedmann dalam Sahris (2013:344-345) merupakan hasil kerja dari

proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep "*empowerment*" merupakan hasil interaksi antara konsep "*topdown* dan "*bottom-up*", antara "*growth strategy* dan "*people-centered strategy*".

Wasistiono (1998:46) telah merangkum pendapat beberapa orang pakar tentang pemberdayaan.

Menurut Carlzon & Macauley pemberdayaan adalah :

“Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya”.

Sementara menurut Carver & Back mendefinisikan pemberdayaan

adalah sebagai berikut:

“Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi”.

Sementara Shardlow mengatakan pada intinya:

“Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”.

Menurut Wasistiono (1998:46) pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat macam dilihat dari sasaran dan ruang lingkungannya yaitu:

- a) Pemberdayaan pada individu anggota organisasi atau anggota masyarakat;
- b) Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat;
- c) Pemberdayaan pada organisasi;
- d) Pemberdayaan pada masyarakat

Sementara menurut Ismet Firdaus dalam Zulfitri (2011:21) pemberdayaan adalah “penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka

sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.

Pengertian lain dari Pemberdayaan juga disampaikan oleh Isbandi (2000:32-33) yakni mengembangkan diri dari keadaan tidak kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya,

pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi (Diana, 1997:15).

Pemberdayaan masyarakat (*Communtiy Emprowment*) pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan) untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan

pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya lingkungan (Zulfitri, 2011:22).

Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.

Menurut Irawan sebagaimana dikutip Badriadi dan Zen (2005:47), pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai
- b. Mempunyai wadah yang terorganisir
- c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat
- d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait
- e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.

Menurut Isbandi (2003:237-238), Upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat
- b. Memberdayakan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
- c. Membantu masyarakat untuk membuat analisa situasi usaha yang berprospektif secara sistematis tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis
- d. Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.



### 3. Pengertian Budidaya Perikanan

Budidaya adalah Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil, suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu dibawah kondisi buatan. Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/ hasil panennya (Wikipedia). Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya adalah " usaha yg bermanfaat dan memberi hasil. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya

dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. Menurut undang-undang (UU) No.9 Tahun 1985 pasal 1 huruf disebutkan: "Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan".

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2003:15) Penelitian Mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dalam Pembudidayaan Ikan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah/ keadaan/ peristiwa sebagai mana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, factual mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Madong Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Alasan saya memilih penelitian ini karena salah satu potensi di

bidang kelautan yang cukup potensial dikembangkan adalah perikanan. Oleh karena itu saya ingin meneliti tentang usaha pembudidayaan ikan. Dan yang menjadi lokasi penelitian saya yaitu Desa Madong karena di Desa Madong ini pembudidayaan ikannya lebih maju dan lebih berhasil dibanding daerah lain yang ada di Provinsi Kepri.

## 3. Informan Penelitian

Informan menurut Arikunto (2010:188) adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Istilah “informan” ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Penentuan Informan dalam penelitian ini pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepri ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2011:96), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dimana penelitian memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti pada penelitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Informan kunci 1 orang kepala bidang program Pemberdayaan, informan utamanya ada 6 orang ketua kelompok itu artinya saya mengambil seluruh kelompok

budidaya ikan yang ada di Kampung Madong sebagai informan. Sedangkan informan tambahan 1 orang Sekertaris Lurah (Seklur) dan 2 orang satuan kerja / pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan yang memang menangani bidang pembudidayaan ikan yang ada di Kampung Madong.

#### 4. Sumber data

##### a) Data primer

Menurut Arikunto (2010:22) Dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.

Data primer diperoleh dari para informan yang meliputi : masyarakat setempat dan aparat

pemerintah yang berhubungan dengan program Pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan ikan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang berhubungan dengan aspek hasil penelitian, meliputi dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

- a) Gambaran umum lokasi pembudidayaan ikan
- b) Tujuan dari kegiatan pembudidayaan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- c) Tahap – tahap yang dilakukan dalam kegiatan pembudidayaan
- d) Manfaat yang diharapkan

## 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Instrument penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi.

### 1. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 274) Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau antara peneliti dan informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dan jelas. Teknik ini disertai pencatatan konsep, gagasan, pengetahuan informan yang dilakukan lewat tatap muka.

### 3. Observasi

Menurut Hadi (2003:116) “Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan”. Dalam penelitian ini observasi berupa pengamatan secara langsung dilapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini telah diberikan batasan dan ukuran-ukuran yang nyata agar bisa digunakan untuk mengukur proses implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada program pembudidayaan ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK.APBD/66/I/2014 tentang

petunjuk teknis pedoman pemberian bantuan/hibah bibit ikan air laut (ikan bawal bintang dan cantang) Kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya perikanan APBD tahun anggaran 2014.

Dalam Surat keputusan tersebut terdapat persyaratan kelompok yang bisa menerima bibit ikan bawal bintang dan cantang yaitu sebagai berikut :

1. Diutamakan pembudidaya ikan penerima bantuan KJA HDPE dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2011/2013 dan atau pembudidaya ikan laut lainnya yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.
2. Mendapatkan rekomendasi dari dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau UPTD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan.

3. Bersedia mengembangkan usaha budidaya ikan, dan berkomitmen mengelola paket bantuan yang diberikan.

Kegiatan pembudidayaan ikan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir yang dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Mengalokasikan bibit ikan bawal bintang dan kerapu sebanyak 1 paket untuk 500 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidayaan ikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
2. Melaksanakan Verifikasi, Sosialisasi dan Koordinasi bantuan/hibah bibit ikan bawal bintang dan Kerapu

3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan/hibah bibit ikan bawal bintang dan Kerapu
4. Membangun jaringan kemitraan usaha.

Untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah tersebut haruslah orang-orang yang telah membentuk/memiliki kelompok. Dan di Kampung Madong terdapat 6 kelompok usaha bersama (KUB) pembudidaya yang telah terbentuk satu kelompok terdiri dari 10 orang.

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dapat di tetapkan beberapa dimensi beserta indikatornya yang mempengaruhi pelaksanaan program pembudidayaan ikan. Adapun dimensi-dimensi tersebut dalam penelitian ini meliputi

Komunikasi, Sumber-sumber, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang di sampaikan kepada komunikan dari komunikator/pemberi pesan baik secara langsung/tidak langsung, komunikasi dapat efektif apabila pesan tersebut dapat di terima dan dipahami oleh pihak penerima pesan. Misalnya menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan arahan dari pemberi pesan/komunikator.

Pakar komunikasi Joseph de Vito dalam Nasir,dkk (2011:203) menyebut ada lima kualitas umum yang dipertimbangkan untuk efektivitas sebuah komunikasi, yaitu adanya keterbukaan, saling mendukung, bersikap positif,

memahami perasaan orang lain, dan adanya kesetaraan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Komunikasi dalam penelitian ini yaitu interaksi antara Pegawai dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok pembudidaya di kampung Madong Kelurahan Kp.Bugis, guna untuk melaporkan perkembangan program budidaya ikan ini. Serta penyuluhan/sosialisasi tentang program budidaya ikan ini agar berjalan dengan baik dan memberi hasil yang baik pula. Kejelasan informasi merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan kebijakan program pembudidayaan ikan ini, jika informasi disampaikan dengan jelas maka kebijakan tidak

akan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Dalam menentukan ukuran yang akan digunakan dalam melihat dimensi komunikasi tersebut melalui indikator :

- a. Kemampuan berinteraksi dengan masyarakat sekitar untuk memajukan program.

Dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki, seberapapun tingkat atau kualitas keterampilan itu. Ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal sehingga setiap tujuan komunikasinya mudah tercapai. Namun, ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilannya sehingga bukan tujuan komunikasinya tercapai, tetapi malah terjadi salah pengertian yang berakibat suasana komunikasi

menjadi buruk. Dan masyarakat juga memiliki karakter dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya interaksi yang baik antar pegawai dengan masyarakat.

Dari hasil pengamatan langsung yang penulis lihat tentang interaksi/hubungan komunikasi antara kelompok pembudidaya ikan dengan penyuluh serta Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari pemerintah maupun masyarakat anggota KUB melakukan hubungan komunikasi yang lancar. Apabila dihubungi oleh anggota KUB tentang adanya masalah dilapangan staff Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri selalu siap datang dan membantu serta tanpa harus dihubungipun mereka selalu



memantau perkembangan program pembudidayaan ini.

- b. Adanya penyuluhan atau sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat/publik mengenai Program Pembudidayaan ikan

Penyuluhan atau sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat tahu program apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam Program Pembudidayaan ikan ini tentang penanganan penyakit ikan, cara pembudidayaan ikan yang baik, kegiatan ini untuk mengutarakan aspirasi serta bertukar pendapat dengan penyuluh tentang apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui cara terbaik yang harus dilaksanakan oleh pembudidaya agar program tersebut dapat di implementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang adanya

sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat/ publik mengenai Program Pembudidayaan ikan ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diadakan dari pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk masyarakat kelompok pembudidaya ikan di kampung Madong telah terlaksana.

## 2. Sumber-Sumber (*Resource*)

Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu para pegawai sebagai implementor dan sarana maupun dana yang diperlukan atau dibutuhkan dalam Implementasi kebijakan tersebut. Jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk melihat dimensi dari sumber-sumber adapun indikator yang dilihat yaitu sumber daya manusia seperti staff Dimensi kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya, adapun indikator dari dimensi sumber daya, meliputi staff dan fasilitas-fasilitas.

a. Staf/ pegawai (Sumber Daya Manusia)

Dalam organisasi Peran staf bukan sekedar pelaksana perintah pimpinan namun staf berperan sebagai pembantu pimpinan. Bentuk

organisasi semacam ini muncul karena makin kompleksnya masalah-masalah organisasi sehingga pimpinan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan memerlukan bantuan orang lain yang dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Meskipun organisasi ini lebih baik dari yang pertama karena keputusan-keputusan dapat lebih baik namun kadang-kadang keputusan-keputusan tersebut akan memakan waktu yang lama karena melalui perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang melelahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber atau Pegawai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bahwa pegawai yang mengikuti kegiatan

reboisasi sudah melaksanakan tugasnya mereka cekatan dan handal dibidangnya masing-masing. Mereka juga sudah sangat bertanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing.

b. Kelengkapan sarana penunjang dalam program budidaya perikanan

Sarana penunjang yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan ini adalah salah satu sumber pendukung seperti pakan, bibit ikan, jaring/keramba apung, dan vitamin ikan.

Dari data observasi yang penulis lihat bahwa sarana yang dibutuhkan berupa bibit ikan, pakan, jaring/ keramba apung dan vitamin sudah tersedia namun belum maksimal bantuan tersebut diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sarana penunjang program pembudidayaan ikan dirasa belum maksimal dalam pemberian bibit ikan yang layak dan dari segi jumlahnya yang teramat sangat sedikit. Sehingga tidak mencukupi apabila dibagi hasilnya kelak dalam satu kelompok. Begitu juga dari pemberian bantuan pangan yang sering terhambat karena cuaca. Mereka harus membuat serta membeli pakan sendiri, padahal itu seharusnya ditanggung dan dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kecendrungan-kecendrungan  
*(Dispositions or attitude)*

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

a. Sikap pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya

apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana dapat pula dilihat dari kejujuran, komitmen dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksanaan dan sikap masyarakat dalam mengikuti program budidaya dari segi kejujuran, komitmen dan tanggung jawab telah terlaksana mulai dari sosialisasi kepada masyarakat sampai kepada pemantauan dari pemerintah hingga tahapan akhir yang membantu mereka memasarkan hasil budidaya mereka. Pihak pemerintah telah melakukan dan menerapkannya dilapangan.

b. Adanya Kerjasama Antar

Pegawai Dalam Melaksanakan Program

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Khususnya bila ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai seorang diri. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut adalah dengan bekerjasama.

Menurut Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bahwa memang Adanya kerjasama yang dilakukan antar pegawai Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai aturan yang berlaku, Bagian penyuluhan mendapatkan informasi program baru dari Kepala bagian pemberdayaan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian penyuluh juga melaporkan apabila ada masalah yang terjadi dari pelaksanaan program pembudidayaan ini kepada penanggung jawab program pembudidayaan. Kemudian bila ada masalah penyakit ikan maka akan dihubungi bagian kesehatan ikan untuk memberi vitamin ikan dan mengecek kelapangan kembali. Dari rangkaian kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar pegawai berjalan sesuai aturan.

#### 4. Struktur Biroksasi

Para imlementator mungkin tahu apa ang harus di kerjakan dan

memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, maka itu ditetapkan dalam sebuah struktur birokrasi harus sesuai dengan standart operasional prosedur yang telah ditetapkan dan pembagian tugas yang jelas agar proses implementasi berjalan dengan efektif.

a. Adanya prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau atau dikenal dengan petunjuk teknis (Juknis) dibuat dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kepri yang berada di bawahnya, agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap organisasi mutlak memegang prinsip efisiensi dan efektivitas. Secara sederhana prinsip efisiensi dan efektivitas pada dasarnya berarti menghindari segala bentuk pemborosan. Dalam hal ini Juknis dapat dijadikan alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja. Juknis juga dapat digunakan untuk kegiatan mendeteksi, mendiagnosa, dan memberi saran-saran yang obyektif dalam pemberian bantuan Hibah dari Pemerintah terhadap masyarakat yang benar-benar tepat untuk mendapatkannya.

Petunjuk teknis adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang

dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Petunjuk Teknis adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Petunjuk teknis dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa kegiatan pembudidayaan ikan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku, karena Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pegawai maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan di kampung Madong.

b. Pembagian tugas yang jelas agar proses implementasi berjalan dengan efektif.

Sebuah instansi/kantor harus adanya struktur birokrasi agar pembagian kerjanya menjadi jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian/bidang tersebut.

Adapun struktur birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan pembudidayaan ikan ini adalah tugas pada bidang perikanan budidaya yang terdiri dari 1 orang kepala bidang dan 7 orang pegawai/satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari wawancara dan observasi yang penulis lihat bahwa memang pembagian tugas dalam kegiatan pembudidayaan ini telah

sesuai dengan struktur organisasi dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam surat keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Terkait dengan pembagian tugas yang jelas agar proses implementasi berjalan efektif Telah Terlah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### 1. Kesimpulan

“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pada Program Pembudidayaan Ikan Di Kampung Madong) ”. Hal-hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada dimensi Komunikasi (*Communication*), pada dimensi komunikasi telah terlaksana yaitu kebijakan tentang Program

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam kegiatan pembudidayaan ikan sudah diinformasikan dengan baik oleh para pegawai kepada masyarakat setempat, Semua pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Yang ikut serta dalam Program Pembudidayaan yang dilakukan di Kampung Madong ini telah menjalankan Program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penyampaian langsung kepada masyarakat. Begitu juga dengan Interaksi antar masyarakat dan pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah terlaksana mereka selalu siap siaga bila diperlukan bantuannya oleh masyarakat pembudidaya, mereka langsung datang



kelapangan dan memantau setiap perkembangan dari kegiatan budidaya ini.

- 2) Pada dimensi Sumber-sumber (*Resource*), pada dimensi ini dirasa kurang maksimal karena ada masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan dari penelitian dilapangan masih ada kendala dalam beberapa hal seperti masalah pakan yang sering terkendala karena cuaca buruk. Serta bibit ikan yang dirasakan masih sangat kurang karena tujuannya untuk memajukan perekonomian masyarakat pesisir mereka hanya merasakan capek dengan hasil yang tidak mencukupi. Adanya harapan dari masyarakat untuk kiranya dibuatkan/disediakan alat serta tempat untuk membuat pangan sendiri dan juga

penambahan jumlah bibit ikan yang diberikan sesuai dengan jumlah orang dalam satu kelompok. Namun dilihat dari kemampuan pegawai dalam menjalankan program ini sudah bagus

- 3) Pada dimensi Kecendrungan-kecendrungan (*Dispositions or Attitude*), pada dimensi kecendrungan-kecendrungan dapat dilihat dari sikap pelaksana, dari segi komitmen, dan tanggung jawab maupun kerjasama yang dilakukan telah terlaksana karena kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap pelaksana yang mengarahkan jalannya kegiatan untuk melancarkan dan agar mencapai tujuan yang diharapkan.

- 4) Pada dimensi struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*), kegiatan Pembudidayaan ini telah terlaksana sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) , begitu juga struktur birokrasi yang jelas mengacu kepada tugas dan fungsi-fungsi dari masing-masing bidang telah terlaksana. Dengan adanya Juknis dan struktur birokrasi yang jelas di dalam suatu instansi maka pembagian kerja menjadi jelas dan lebih terarah.

## 2. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau khususnya pegawai yang melaksanakan kebijakan Kegiatan pembudidayaan ikan maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari segi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan di kampung Madong sudah terlaksana namun tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk kegiatan selanjutnya.
- 2) Dari segi sumber daya yang ada diharapkan pemerintah mau mendengarkan keluhan masyarakat mengenai pakan, diharapkan pemerintah dapat

menyediakan tempat pembuatan pakan sendiri dan dikelola oleh kelompok pembudidaya secara bergantian. Serta untuk kedepannya agar ditambah lagi jumlah pemberian bibit ikan agar bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat pesisir yang ada di kampung Madong. Dan agar benar benar diperhatikan bibit ikan yang diberikan harus yang berkualitas baik.

- 3) Dari segi kecendrungan-kecendrungan baik perilaku dan kerjasama dalam kegiatan pembudidayaan ini sudah baik semoga kedepannya tetap terjaga silaturahmi yang baik antar pemerintah dan warga kampung Madong. Dan diharap kerjasamanya dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang ada. Dan segera di

realisasikan pembuatan kelong serta pembelian alat pembuatan pakan ikan.

- 4) Sedangkan dari segi struktur birokrasi sudah baik hanya saja pemerintah harus lebih membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dan struktur organisasinya sesuai dengan kegiatan atau program yang sedang dijalankan didalam surat keputusan agar lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Yogyakarta: Rineka Cipta.

Dahuri, R. 2002. *Kebijakan Dan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Diana, 1997. *Perencanaan Sosial Negara Berkembang*, Yogyakarta :Gajah Mada University Press

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan (Isu, Sintesis Dan Gagasan)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Gaffar, Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Isbandi, Rukminto Adi, 2000. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, cet ke-1 Jakarta : Fakultas Ekonomi UI
- Isbandi, Rukminto Adi, 2003. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : UI Press
- Lili Badriadi, Muhammad Zen, 2005. *Zakat dan wirausaha* , Jakarta, CV. Pustaka Amri
- Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy (cetakan ke-4)*, Jakarta, GRAMEDIA
- Purnaweni, H. 1991. *Diktat Untuk Kebijakan Publik : Suntingan Dari Implementing Public Policy*, George Edward III : Semarang.
- Robin, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi Jilid II*. Jakarta : Prehalindo.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi (cetakan ke-19)*, Bandung, Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu, 1998, *Pemberdayaan Aparatur Daerah*, Abdi Praja, Bandung.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia. Jakarta : Rajawali Press.

## 2. JURNAL

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi ,2011, *implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, (diakses 15 juni 2014, 13:26:15WIB).

Putra, Harry Prima, *Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM MP)*, (diakses 6 September 2014, 10:34 WIB)

Sahris, Zenabidin, 2013, *Modul kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat pesisir*, (diakses 17 September 2014, 10:42:13 WIB)

### 3. SKRIPSI

Sugiana, Puji Meilita, 2012, *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan”*, Tesis, Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Supayuliandari, Fhani, 2014, *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Studi pada Program Reboisasi Kawasan Hutan Mangrove di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan)”* Skripsi Sarjana jurusan Ilmu administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Wardhani, Ratiqa Yana, 2013, *“Strategi Pengembangan Pariwisata Museum Kota Tanjungpinang”* Skripsi Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Haji.

Widdiyastuti, 2012, *Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang”*, skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji.

Zulfitri, 2011, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk”*, skripsi jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

### 3. DOKUMEN

Database Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri tahun 2012

Departemen Perikanan Dan Kelautan. 2004. Keputusan Menteri Perikanan Dan Kelautan RI No 18 Tentang Program PEMP. Jakarta.

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 2014. Surat Keputusan Nomor 523/DKP-SK.APBD/66/I/2014 Tentang petunjuk teknis pedoman pemberian bantuan/hibah bibit ikan air laut (ikan bawal bintang dan cantang)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang 27 tahun 2007 Tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.